



ANALISIS BAHASA KEKUASAAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA DALAM BERITA DI MEDIA (*TINJAUAN WACANA KRITIS*)

Mustafa
Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia
PPs Universitas Negeri Makassar
Jalan Bonto Langkasa, Makassar
email: mustafaalolea@yahoo.com
[Telp: 081242095754](tel:081242095754)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bahasa kekuasaan Pemerintah Kabupaten Mimika dalam berita di media berdasarkan teori Michel Foucault tentang struktur diskursif bahasa kekuasaan. Data bersumber dari beberapa media online seperti jeratpapua.org, skalanews.com, kemendagri.go.id, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan baca dan catat. Hasil penelitian ini adalah (1) struktur diskursif bahasa kekuasaan diwujudkan dalam bentuk ragam hukum yang berupa kata, frasa, dan kalimat. (2) struktur diskursif bahasa kekuasaan diwujudkan dalam bentuk moral/religius yang berupa kata, frasa, dan kalimat. (3) struktur diskursif bahasa kekuasaan diwujudkan dalam bentuk sosial yang berupa kata, frasa, dan kalimat. Penggunaan struktur diskursif bahasa kekuasaan berupa ragam hukum, moral/religius, dan sosial yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika mampu menggiring opini publik kearah yang positif sehingga bisa melanggengkan kekuasaan Pemerintah Kabupaten Mimika meskipun dalam perjalanan pemerintahan dijumpai berbagai persoalan.

Kata kunci: bahasa kekuasaan, Pemerintah Kab. Mimika, Michel Foucault.

PENDAHULUAN

Bahasa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia karena seluruh kegiatan interaksi selalu menggunakan bahasa sebagai media. Hal ini menunjukkan bahwa peranan bahasa sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh sederhana, ketika seseorang ingin meminjam buku temannya, maka orang tersebut paling tidak harus mengucapkan kalimat, “*Bisa pinjam buku ini?*”, maka kemungkinan temannya pun akan memberikan jawaban “*ya*” atau “*tidak*”. Contoh sederhana inilah yang menandakan bahwa penggunaan bahasa tidak bisa dipisahkan dari kegiatan interaksi. Bisa dibayangkan jika seseorang ingin meminjam buku orang lain dan langsung mengambilnya tanpa sepatah kata pun, maka besar kemungkinan akan menimbulkan kesalahpahaman.

Kenyataan akan penggunaan bahasa sebagai media untuk menyampaikan maksud pada orang lain membuat bahasa yang digunakan sebagai sesuatu yang selalu memiliki muatan kepentingan. Kegiatan interaksi/komunikasi dengan orang lain bukan berarti hanya sebagai kegiatan yang dilakukan tanpa ada tujuan sebab bahasa yang diucapkan oleh penutur dan petutur (dalam bahasa lisan) atau penulis dan pembaca (dalam bahasa tulis) selalu memiliki maksud dan tujuan tertentu. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan ahli wacana Michel Foucault (2012:385) bahwa bahasa yang diproduksi oleh seseorang bukanlah sesuatu yang netral, akan tetapi bahasa selalu memiliki muatan kepentingan.

Wacana merupakan studi bahasa dengan berlandaskan pada pendekatan pragmatik yang mengkaji makna bahasa berdasarkan konteks. Wacana dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, baik lisan maupun tulis. Adapun contoh wacana lisan yaitu ketika seorang ibu sedang menasihati



anaknya, majikan yang berbicara dengan pembantunya, dan sebagainya. Sedangkan contoh wacana tulisan yaitu berita di surat kabar, berita di majalah, iklan berupa poster dan sebagainya.

Foucault, salah satu ahli wacana yang banyak menyumbangkan pemikirannya terkait wacana, mengatakan bahwa antara wacana dan kekuasaan memiliki hubungan timbal balik. Wacana senantiasa menjadi alat bagi kepentingan kekuasaan, hegemoni, dominasi budaya, dan ilmu pengetahuan. Wacana disebarkan melalui media, baik cetak maupun elektronik, akan menjadi pengetahuan bagi masyarakat dan pengetahuan akan menimbulkan efek kuasa. Hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan di sini terlihat jelas bahwa kekuasaan bukan hanya tentang kepemilikan akan tetapi lebih dari itu kekuasaan harus diproduksi melalui wacana. Wacana yang diproduksi pun harus memenuhi struktur diskursif sehingga dapat menjadi sesuatu yang paling dipercaya dan dipandang benar. Struktur diskursif dapat diwujudkan melalui ragam hukum, moral/religius, dan sosial. Struktur diskursif yang diproduksi akan melahirkan wacana yang logis dan bahkan melogiskan suatu wacana.

Berbagai persoalan yang terjadi di Kabupaten Mimika tidak menimbulkan dampak signifikan yang mengganggu jalannya roda pemerintahan. Bahkan kasus ijazah palsu yang melibatkan Bupati Eltinus Omaleng dan telah diputus oleh Mahkamah Agung tidak berdampak pada status Bupati Mimika yang sampai saat ini masih aktif padahal putusan MA No. 01/P/KHS/2017 ini dikeluarkan sejak 9 Maret 2017. Roda pemerintahan yang sampai saat ini masih berjalan lancar tentunya sangat dipengaruhi oleh komunikasi efektif berupa penyebaran wacana di masyarakat yang memenuhi unsur diskursif sehingga bisa diterima oleh masyarakat.

Komunikasi yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Mimika dengan masyarakat tentunya menarik untuk diteliti. Pemerintah Kabupaten Mimika secara realitas mampu membangun komunikasi melalui penyebaran wacana di media massa terkait program-program yang dilaksanakan, direncanakan, dan tanggapan terhadap persoalan yang terjadi di Kabupaten Mimika. Wacana yang disebarkan ke masyarakat tentunya selalu bermuatan kepentingan sehingga jika dikemas secara baik maka wacana akan mampu menjadi alat untuk mengontrol kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan.

KAJIAN PUSTAKA

Wacana (*discourse*) berasal dari bahasa latin, *discurses*. Secara terbatas, istilah ini menunjuk pada aturan-aturan dan kebiasaan-kebiasaan yang mendasari penggunaan bahasa baik dalam komunikasi lisan maupun tulisan (Darma, 2014:1). Menurut Foucault (dalam Badara, 2012:16) wacana kadang kala sebagai bidang dari semua pernyataan (*statement*), kadang kala sebagai individualisasi kelompok pernyataan, dan kadang sebagai praktik regulatif yang dilihat dari sejumlah pernyataan. Ismail Marahimin mengartikan wacana sebagai “kemampuan untuk maju (dalam pembahasan) menurut urutan-urutan yang teratur dan semestinya”, dan “komunikasi buah pikiran, baik lisan maupun tulisan, yang resmi dan teratur” (Sobur, 2001:10). Pandangan senada mengenai wacana yang sebelumnya dikemukakan oleh Roger Fowler (dalam Jufri, 2008:1) yang menyatakan bahwa wacana adalah komunikasi tulisan dan lisan yang dilihat dari titik pandang kepercayaan, nilai, dan kategori yang masuk di dalamnya; kepercayaan di sini mewakili pandangan dunia; sebuah organisasi atau representasi dari pengalaman. Berdasarkan beberapa pandangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa wacana adalah penggunaan bahasa baik secara lisan dan tulisan dengan disertai konteks komunikasi.

Selanjutnya, Eriyanto (2001:6) mendefinisikan analisis wacana sebagai studi tentang struktur pesan dalam peristiwa komunikasi. Lahirnya analisis wacana karena adanya kesadaran bahwa untuk mengetahui pesan dalam bahasa, tidak hanya bisa dilihat secara mandiri sebagai sebuah struktur namun lebih jauh dapat diketahui melalui kajian yang mendalam. Menurut Darma (2014:10) analisis wacana dalam arti paling sederhana adalah kajian terhadap satuan bahasa di atas kalimat. Lazimnya,



perlu arti istilah dikaitkan dengan konteks lebih luas yang mempengaruhi makna secara keseluruhan. Beberapa analisis wacana mempertimbangkan konteks yang lebih luas lagi untuk memahami bagaimana konteks itu mempengaruhi makna kalimat.

Analisis wacana kritis bersifat kritis yang ditilik dari dua makna yaitu makna pertama didasarkan pada gagasan Mazhab Frankfurt (terutama karya Jurgen Habermas) dan makna yang lain didasarkan pada tradisi bersama yang disebut dengan linguistik kritis (*critical linguistics*). Lebih lanjut, menurut Habermas, suatu ilmu kritis harus bersifat refleksi diri (*self-reflexive*) yaitu harus mencerminkan minat yang digunakan sebagai dasar keilmuannya dan harus mempertimbangkan konteks historis interaksi. Konsep Habermas tentang situasi tuturan ideal merupakan visi utopian interaksi atau relasi kekuasaan. Melalui wacana rasional, wacana yang secara ideologis cacat bisa dipecahkan dan bisa dicapai pendekatan pada situasi tuturan yang ideal tersebut (Titscher dkk, 2009:236).

Asumsi dasar analisis wacana kritis ialah bahwa bahasa digunakan untuk beragam fungsi dan bahasa mempunyai berbagai konsekuensi. Bisa untuk memerintah, memengaruhi, mendeskripsi, mengiba, memanipulasi, menggerakkan kelompok atau membujuk. Setiap penggunaan bahasa mengandung konsekuensi-konsekuensi, baik yang bisa diramalkan maupun yang tidak diharapkan. Bahasa juga merupakan mekanisme kontrol sosial yang sangat kuat, maka bisa disanggah dan patut diperdebatkan. Bahasa menentukan prasyarat untuk mengembangkan praktik-praktik sosial dan persetujuan-persetujuan sosial. Dalam penggunaan bahasa, ada retorika, manipulasi, dan penyesatan. Maka sangat tergantung pada pemaknaannya, padahal pemaknaan diarahkan oleh unsur-unsur sintaksisnya (Haryatmoko, 2016:5-6).

Kekuasaan senantiasa menggunakan bahasa sebagai media. Menurut Jufri (2008:81) bahasa kekuasaan atau bahasa yang menunjukkan adanya kekuasaan baik secara terang-terangan ataupun terselubung memang dalam penggunaan sehari-hari terdapat dalam berbagai wacana. Oleh karena itu, bahasa yang digunakannya bahasa yang lugas, bahasa apa adanya, bahasa yang biasa digunakan oleh penguasa yang menggambarkan bahwa orang lain tidak tahu kecuali saya. Sejalan dengan itu, Priyatni (2010:50) mengungkapkan bahwa kekuasaan sering dimaknai secara sederhana sebagai suatu dominasi yang dilakukan oleh orang yang lebih kuat secara fisik dan mental kepada orang yang lebih lemah atau yang dilakukan orang terkenal atau orang yang mempunyai posisi sosial lebih tinggi kepada mereka yang memiliki posisi sosial lebih rendah. Representasi kekuasaan dapat berupa: isu gender, ras, marginalisasi sosial, eksploitasi, dan ketidak berdayaan.

Menurut Foucault, penguasa/orang yang mendominasi akan senantiasa melanggengkan kekuasaannya dengan memproduksi wacana melalui struktur diskursif bahasa kekuasaan sehingga orang atau kelompok yang didominasi bisa menerima dan menganggap wajar hal yang diharapkan oleh kelompok yang mendominasi atau kelompok yang berkuasa. Kekuasaan tidak serta merta dapat diraih dengan mudah akan tetapi kekuasaan harus diciptakan melalui hubungan yang menunjangnya. Produksi wacana sebagai cara yang digunakan untuk membangun basis pengetahuan dan pengetahuan yang akan memberikan efek kuasa. Kekuasaan yang diraih melalui wacana harus melalui struktur diskursif berupa ragam hukum, moral/religius, dan sosial yang tidak hanya mengacu pada sesuatu, melainkan turut menghasikan perilaku, nilai-nilai, dan ideologi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini tergolong ke dalam penelitian kualitatif. Sugiyono (2015:15) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivise*, digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian



kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa ciri utama penelitian kualitatif adalah penelitian yang melibatkan peneliti secara langsung sebagai instrumen utama penelitian serta penggambaran data secara alamiah sesuai dengan aslinya atau apa adanya.

Penelitian ini difokuskan pada bahasa kekuasaan Pemerintah Kabupaten Mimika di media cetak/surat kabar yang diperoleh secara daring di beberapa media. Pihak yang menjadi fokus penelitian yaitu pihak eksekutif dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika. Bahasa kekuasaan yang dimaksud yaitu representasi linguistik yang diperjuangkan baik berupa kata, frasa, dan kalimat yang memiliki muatan ideologi kekuasaan dengan berlandaskan teori Michel Foucault.

Analisis data penelitian ini dilakukan melalui model Alir Miles dan Huberman yang terdiri atas lima tahap, yakni: (1) identifikasi, (2) reduksi data, (3) penyajian data, (4) penarikan kesimpulan dan verifikasi, dan (5) kesimpulan akhir rekomendasi (Jufri, 2007: 165).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian pada surat kabar *online* yang diperoleh dari beberapa media menunjukkan bahwa bahasa kekuasaan Pemerintah Kabupaten Mimika dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika di Provinsi Papua menunjukkan adanya penyebaran wacana kepada masyarakat secara efektif. Wacana yang disebarkan dikatakan efektif karena dalam menyebarkan wacana di masyarakat, Pemerintah mampu menggiring pandangan masyarakat tentang kelogisan kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan, sedang berjalan, telah dilaksanakan, dan tanggapan terhadap persoalan yang terjadi di masyarakat selama menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika periode 2014-2018. Pernyataan-pernyataan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika di media sebagai wahana dalam menyebarkan wacana mampu melanggengkan kekuasaannya selama lima tahun di kabupaten yang dipimpin.

Penyebaran wacana di media tentunya harus memenuhi unsur diskursif sehingga dapat diterima secara logis oleh masyarakat. Unsur diskursif akan menggiring masyarakat pada penerimaan/persetujuan terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Struktur diskursif bahasa kekuasaan yang direalisasikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika di media massa berupa penggunaan ragam hukum, moral/religius, dan sosial. Ragam hukum, moral/religius, dan sosial yang digunakan direpresentasikan dalam bentuk kata, frasa dan kalimat.

1. Ragam Hukum

Berdasarkan data wacana berita yang telah dikumpulkan, bahasa kekuasaan Pemerintah Kabupaten Mimika berupa ragam hukum direpresentasikan dalam bentuk kata, frasa, dan kalimat.

Data 14.1

"Silahkan, kami siap menghadapi itu. Kalau PT PAL dan pemilik ulayat mau **menggugat**, pemerintah daerah Mimika siap menghadapi itu," tegas Bupati Omaleng.

Data 15.4

"Selalu dikatakan bahwa di dalam **kontrak kerja** ini pemerintah Indonesia dengan Freeport sudah tandatangan bersama, jadi kami diarahkan ke pemerintah terus. Itu tahun ke tahun," kata dia.

Data 16.1

"Gubernur punya waktu 14 hari untuk menyatakan banding ke PT TUN di Makassar. **Kalau dalam waktu 14 hari tidak banding, maka putusan PTUN Jayapura berkekuatan hukum tetap**. Atas dasar itu, nanti kita ajukan nama-nama baru (sesuai SK KPU Mimika Nomor 16a) untuk dilantik menjadi anggota DPRD Mimika," jelas Omaleng.

Pada data 14.1 ditemukan kata **menggugat** yang maknanya mendakwa; mengadukan (perkara). Dalam konteks pernyataan Bupati Mimika tersebut, dengan gamlang dia menyatakan



kesiapannya untuk menghadapi pihak PT PAL jika ingin membawa perkara pencabutan izin perusahaan yang dilakukannya karena Bupati menganggap bahwa kehadiran perusahaan tersebut di Kabupaten Mimika justru lebih banyak merugikan masyarakat jika dibandingkan manfaatnya karena berdampak pada kerusakan lingkungan.

Pada data 15.4 ditemukan frasa **kontrak kerja** yang maknanya perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan atau tulisan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban pekerja dan perusahaan. Frasa *kontrak kerja* yang disepakati oleh PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Pusat dianggap oleh Bupati Mimika sangat merugikan rakyat Papua terkhusus yang tinggal di Kabupaten Mimika karena secara adat masyarakat Kabupaten Mimika yang memiliki hak ulayat atas tanah yang ditempati beroperasi PT Freeport Indonesia tapi royalti dan manfaat yang diterima oleh masyarakat masih kurang layak. Tuntutan Bupati Mimika pada PT Freeport untuk memberikan kesejahteraan yang lebih layak kepada masyarakat sangatlah dibutuhkan sebagai wujud menciptakan keberpihakan pada masyarakat yang tinggal di Kabupaten Mimika.

Selanjutnya, data 16.1 ditemukan kalimat **Kalau dalam waktu 14 hari tidak banding, maka putusan PTUN Jayapura berkekuatan hukum tetap**, kalimat tersebut berarti bahwa jangka waktu menyatakan kasasi hanya 14 hari sesudah putusan yang akan diajukan kasasi diberitahukan kepada terdakwa dan terdakwa dinyatakan menerima jika sesudah 14 hari tersebut tidak menyatakan kasasi. Kalimat tersebut berkaitan dengan polemik diterbitkannya 2 SK oleh KPU Mimika pada pemilihan anggota DPRD priode 2014-2019 yang menimbulkan polemik keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika. Persoalan tersebut menimbulkan reaksi penuntutan oleh anggota DPRD yang merasa dirugikan atas munculnya 2 SK yang berbeda dengan keanggotaan DPRD yang berbeda. Dalam persoalan ini, Bupati Mimika hanya berpatokan pada hasil persidangan untuk menyatakan kesiapannya menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban pada anggota DPRD yang dinyatakan sah secara hukum.

2. Moral/Religius

Berdasarkan data wacana berita yang telah dikumpulkan, bahasa kekuasaan Pemerintah Kabupaten Mimika berupa moral/religius direpresentasikan dalam bentuk kata, frasa, dan kalimat.

Data 15.7

“Maksud pemberian insentif kepada para tokoh agama sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah daerah terhadap tugas mereka dalam membangun **iman** dan **spiritualitas** umat beragama di Kabupaten Mimika,” ujar Bupati Omaleng.

Data 17.9

“Tentu yang diharapkan di Desember agar penyelenggaraan Natal di gereja-gereja bisa terlaksana dengan baik. Sehingga **makna Natal** itu betul-betul ada dalam hati kita,” harapnya.

Data 14.9

“Saya mengucapkan selamat kepada segenap pimpinan dan karyawan BPJS Ketenagakerjaan Timika atas semua partisipasinya dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Mimika ini. **Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa membimbing kita dalam tugas dan pengabdian mensejahterakan masyarakat**,” tandasnya.

Pada data 15.7 ditemukan kata **iman** dan **spiritualitas**, iman berarti keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, Nabi, kitab, dan sebagainya. Spritualitas berarti perilaku atau sifat tertentu seorang individu. Kata iman dan spritualitas digunakan oleh Bupati Mimika dalam pernyataannya sebagai sumbangsi yang telah diberikan oleh tokoh agama dalam membangun Kabupaten Mimika. Oleh karena itu, Bupati memberikan apresiasi atas peran serta mereka dalam membantu pemerintah memajukan sumber daya manusia khususnya dalam bidang moral/religius.



Pada data 17.9 ditemukan frasa **makna natal** yang berarti hari raya natal yang memberikan kesan baik atau membentuk pribadi yang baik. Frasa tersebut diungkapkan oleh Wakil Bupati, Yohanis Bassang dalam himbauannya kepada warga Mimika dalam menyambut perayaan Natal dan tahun baru di penghujung tahun. Pengungkapan frasa *makna natal* tersebut tentunya akan berdampak pada himbauan yang diungkapkan oleh Wakil Bupati kepada masyarakat untuk menjaga keamanan, kedamaian, dan ketentraman selama pelaksanaan Natal dan tahun baru.

Selanjutnya, data 14.9 ditemukan kalimat **Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa membimbing kita dalam tugas dan pengabdian mensejahterakan masyarakat**, kalimat ini diungkapkan oleh Bupati Mimika sebagai wujud terima kasih atas keterlibatan BPJS Ketenagakerjaan dalam membangun di Kabupaten Mimika. Kalimat tersebut tentunya diungkapkan oleh Bupati agar kedepannya, sumbangsi pihak BPJS Ketenagakerjaan bisa lebih ditingkatkan dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

3. Sosial

Berdasarkan data wacana berita yang telah dikumpulkan, bahasa kekuasaan Pemerintah Kabupaten Mimika berupa sosial direpresentasikan dalam bentuk kata, frasa, dan kalimat.

Data 15.7

“Saya minta mereka untuk **membantu** pemerintah. Jangan sampai masyarakatnya membuat masalah. Kita tidak mau ada konflik dan kekacauan lagi di Kabupaten Mimika,” ujarnya.

Data 17.5

“Sampai sekarang saya masih **bangun komunikasi** dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk mencari tokoh yang memiliki keberanian untuk bertemu langsung dengan KKB,” ujarnya.

Data 14.4

"Tidak ada pihak yang kalah dalam Pilkada ini, kita semua menang baik OMBAS maupun AMAN. **Mari kita bergandengan tangan untuk membangun Mimika menjadi lebih baik,**" kata Eltinus.

Pada data 15.7 ditemukan kata **membantu** yaitu memberi sokongan (tenaga dan sebagainya) supaya kuat (kukuh, berhasil baik, dan sebagainya); menolong. Kata tersebut digunakan oleh Bupati dalam memberikan arahan kepada tokoh agama supaya mempunyai sifat sosial membantu pemerintah dalam menjaga kerukunan, kemandirian, dan ketentraman di Kabupaten Mimika. Himbauan ini tentunya memiliki motif yang mendasar sebab di Kabupaten Mimika sering terjadi konflik sosial seperti perang antarsuku yang hampir terjadi setiap tahun.

Pada data 17.5 ditemukan frasa **bangun komunikasi** yang berarti melakukan hubungan/kontak. Frasa tersebut digunakan Bupati Mimika dalam mencari jalan keluar terhadap aksi Kelompok Kriminal Bersenjata yang melakukan aksi intimidasi dan teror terhadap warga Mimika yang bertempat di Distrik Tembagapura. Komunikasi tentunya salah satu cara yang dianggap oleh Bupati cukup efektif dalam menghentikan aksi KKB tanpa harus melakukan kontak senjata.

Selanjutnya data 14.4 ditemukan kalimat **Mari kita bergandengan tangan untuk membangun Mimika menjadi lebih baik**, kalimat ini diungkapkan oleh Eltinus Omaleng saat dinyatakan menang oleh KPU Mimika dalam Pilkada putaran kedua yang mempertemukan pasangan Eltinus Omaleng-Yohanis Bassang (OMBAS) dan Abdul Muis dan Hans Magal (AMAN) dalam Pilkada Mimika tahun 2014. Kalimat tersebut memiliki pesan sosial kemasyarakatan yang kuat untuk memajukan Kabupaten Mimika secara bersama-sama oleh pasangan yang dinyatakan menang maupun kalah dalam Pilkada.

SIMPULAN

Bahasa dan kekuasaan memiliki keterkaitan yang sangat erat seperti dua sisi mata uang. Oleh karena itu, pengontrolan kekuasaan akan efektif jika menggunakan penyebaran wacana pada masyarakat dengan cara yang baik. Wacana yang baik tentunya harus memiliki unsur diskursif atau



kelogisan sehingga bisa diterima dan dibenarkan oleh masyarakat sebagai pihak yang dikontrol. Struktur diskursif bahasa kekuasaan berdasarkan teori Michel Foucault berkaitan dengan penggunaan ragam hukum, moral/religius, dan sosial. Penggunaan unsur-unsur tersebut dalam menyebarkan wacana untuk membangun kekuasaan akan mendapat respon positif dari masyarakat yang pada akhirnya akan memudahkan pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya karena mendapat dukungan dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia online*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Badara, Aris. 2012. *Analisis Wacana: Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Darma, Yoce Aliah. 2014. *Analisis Wacana Kritis dalam Multiperspektif*. Bandung: Refika Aditama.
- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta.
- Foucault, Michel. 2002. *Power/Knowledge*. Terjemahan oleh Yudi Santoso. Jogjakarta: Benteng Budaya.
- Foucault, Michel. 2012. *Arkeologi Pengetahuan*. Terjemahan oleh Inyik Ridwan Muzir. Jogjakarta: IRCiSoD.
- Haryatmoko. 2016. *Critical Discourse Analysis: Landasan Teori, Metodologi dan penerapan*. Yogyakarta: Rajawali Pers.
- Jufri. 2007. *Metode Penelitian Bahasa, Sastra, dan Budaya*. Makassar: Badan Penerbit UNM.
- Jufri. 2008. *Analisis Wacana Kritis*. Makassar: Badan Penerbit UNM.
- Priyatni, Endah Tri. 2010. *Membaca Sastra dengan Ancangan Literasi Kritis*. Malang: Bumi Aksara.
- Sobur, Alex. 2001. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Titscher, Stefan, dkk. 2009. *Metode Analisis Teks & Wacana*. Terjemahan oleh Gazali, dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.